

B AB II

DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI SELANDIA BARU DALAM ISU PERUBAHAN IKLIM

Dinamika, arah dan tujuan politik luar negeri Selandia Baru tentunya mengalami dan perubahan sesuai dengan siapa yang memimpin. Bab ini akan membahas mengenai dinamika kebijakan luar negeri Selandia Baru terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim. Penjabaran mengenai fokus kebijakan luar negeri Selandia Baru terkait isu perubahan iklim akan dimulai pada masa pemerintahan partai buruh keempat yang dipimpin oleh David Lange sampai dengan pemerintahan Jacinda Ardern. Hal ini untuk melihat bagaimana dinamika, perkembangan, dan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Selandia Baru utamanya terkait perubahan iklim selama kurang lebih 37 tahun. Tulisan ini juga akan memuat apa saja fokus kebijakan luar negeri tiap periode dan pemerintahan.

Sebagai sebuah isu kontemporer, urgensi pentingnya membuat kebijakan terkait lingkungan dan perubahan iklim tidak semata-mata muncul begitu saja. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana perkembangannya mulai dari awal isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi sorotan dunia internasional sampai dengan saat ini. Tulisan ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan corak kepemimpinan yang ada di Selandia Baru agar dapat menjadi pembanding dengan pemerintahan Jacinda Ardern saat ini.

2.1 Selandia Baru, Nilai Anti-Nuklir dan Kebijakan Lingkungan Partai Buruh Keempat (1984-1990)

Kebijakan luar negeri Selandia Baru pada masa pemerintahan pemerintahan Partai Buruh keempat lebih berfokus pada pembangunan ekonomi sebagai akibat dari krisis moneter pada masa itu. Pemerintahan Partai Buruh keempat di Selandia Baru dibagi dalam tiga pemerintahan perdana menteri, yaitu Perdana Menteri David Lange (1984-1989), Perdana Menteri Geoffrey Palmer (1989-1990), dan Perdana Menteri Mike Moore (1990). Dengan begitu, tulisan ini akan membagi kebijakan luar negeri utamanya mengenai isu perubahan iklim di Selandia Baru masa pemerintahan Partai Buruh keempat menjadi dalam tiga masa pemerintahan perdana Menteri tersebut.

2.1.1 David Lange

Pada pemerintahan Lange, kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya adalah terkait dengan undang-undang pelarangan kapal dan pesawat terbang bertenaga nuklir di wilayah Selandia Baru serta mempromosikan mengenai Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan pada tahun 1984 (Right Livelihood, 2003). Pada masa pemerintahan ini, kebijakan Lange terkait Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik menjadi tantangan baru bagi hubungannya dengan Amerika Serikat dan Australia dimana ketiganya bergabung dalam aliansi bernama ANZUS (*The Australia, New Zealand, United States Security Treaty*).

Perselisihan antara Amerika Serikat dan Selandia Baru diawali pada Januari 1985 saat USS Buchanan—yang memiliki kemampuan membawa senjata nuklir—

berencana untuk mengunjungi Selandia Baru dalam rangka latihan angkatan laut ANZUS (Mack, 1986:447). Akan tetapi, Lange menolak kunjungan militer Amerika Serikat ke Selandia Baru karena ia berpegang teguh pada pandangan anti-nuklir yang dimilikinya. Sehingga kapal angkatan laut tersebut batal melakukan latihan ANZUS di Selandia Baru.

Penolakan yang dilakukan oleh Selandia Baru membuat krisis dan ketegangan hubungan antar kedua negara berlangsung. Pasalnya, Amerika Serikat menyatakan bahwa Selandia Baru seharusnya tidak menghalangi proses pelatihan militer karena hal tersebut merupakan '*core obligations*' dan kesepakatan dari aliansi ANZUS (Mediansky, 1985:17). Akibatnya, Amerika Serikat menarik kembali kapalnya dari Selandia Baru dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak dapat memberikan jaminan perlindungan militer pada Selandia Baru.

Sebelum menjabat menjadi Perdana Menteri, Lange sudah sangat vokal dalam menyuarakan perdamaian internasional. Pada tahun 1960-an ia sudah terlibat dalam pawai perdamaian dan pendampingan hukum para aktivis perdamaian (letters 2006 halaman 84). Selain itu, pemerintahan pada masa ini juga menunjukkan komitmennya yang besar dalam menjaga dan membangun perdamaian internasional. Hal itu bisa dibuktikan dengan peran Selandia Baru dalam peristiwa gencatan senjata Iran dan Irak tahun 1988. Selandia Baru mengirimkan sekitar dua puluh delapan militer PBB untuk memantau konflik tersebut. Selain itu, di tahun 1989, Selandia Baru juga mengirimkan sekitar empat belas insinyur militer dan tiga puluh dua petugas polisi ke Namibia untuk berpartisipasi dalam program PBB guna mendukung kemerdekaan negara tersebut

(McCraw, 2000:9). Pada tahun 1985, Selandia Baru membantu menegosiasikan Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan (*South Pacific Nuclear Free Zone*) dan menuntut kompensasi dari Prancis atas kejayaan pengeboman kapal *Rainbow Warrior* di Auckland (Thakur, 1986:209). Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa Selandia Baru berperan aktif dalam upaya penegakkan perdamaian internasional dan kemerdekaan tiap negara.

Dalam bidang ekonomi, Selandia Baru mengalami beberapa reformasi dan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintahan Perdana Menteri Lange cenderung menolak pendekatan intervesionis dari negara dan lebih memilih pada praktik liberalisasi pasar. Sebagai gantinya, pendekatan liberal ini membuat nilai uang Selandia Baru berhasil naik, pengendalian suku bunga dihapuskan, sektor industri dirombak, subsidi ekspor dihapuskan dan impor diliberalisasikan (Boston, 1987a:366). Liberalisasi ekonomi ini merupakan solusi dari krisis ekonomi yang terjadi pada masa itu.

Britania Raya yang merupakan salah satu pengimpor produk olahan ternak dari Selandia Baru mengalami krisis pada masa itu, sehingga Perdana Menteri Lange merasa hal tersebut menjadi tantangan bagi kelangsungan perekonomian Selandia Baru (Mintrom & Thomas, 2019:267). Pada tahun 1970an sampai dengan awal 1980, Selandia Baru mengalami kemunduran ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran. Britania Raya yang bergabung pada Komunitas Eropa di tahun 1973 membuat ketergantungan ekonomi keduanya merenggang. Sebagai hasil, pendapatan ekspor dan permintaan Selandia Baru menyusut. Selain itu, adanya *oil shocks* di tahun 1973 sampai dengan 1978

mempengaruhi Selandia baru yang notabene sangat bergantung pada pasokan minyak internasional(Mintrom & Thomas, 2019:268).

Masa pemerintahan Lange dipenuhi dengan reformasi ekonomi sehingga muncul istilah Rogernomic yang berasal dari nama Roger Douglas, Menteri Keuangan Selandia Baru pada masa itu. Basis kebijakan ini hampir mirip dengan kebijakan Amerika Serikat, Reaganomics, dimana adanya penerapan neoliberalisme dalam sistem ekonomi politik suatu negara. Adanya perubahan radikal dari liberalisasi ekonomi ini menghasilkan beberapa kebijakan seperti UU Badan Usaha Milik Negara 1987, UU Sektor Negara 1988, UU Keuangan Publik 1989, dan Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal tahun 1994 (Boston & Douglas, 2011:99) Undang-undang ini memberi dampak pada berubahnya operasi dan pelayanan sektor publik di Selandia Baru.

Kendati fokus dari kebijakan Lange adalah pada pemulihan ekonomi Selandia Baru, pemerintahan ini juga mengeluarkan beberapa undang-undang terkait dengan lingkungan. Pada 18 Desember 1986, dibentuk undang-undang lingkungan yaitu *Environmental Act 1987* yang menjadi pondasi utama terbentuknya Kementerian Lingkungan dan Kantor Komisaris Parlemen untuk Lingkungan Hidup (*Environment Act 1986*, 1986). Undang-undang tersebut berisi mengenai fungsi dan tugas kedua institusi lingkungan di Selandia Baru. Selain itu, dibentuk juga Undang-Undang Konservasi 1987 (*Conservation Act 1987*) yang menjadi cikal-bakal terbentuknya Departemen Konservasi Selandia Baru (*Te Papa Atawhai*). Undang-undang ini mewadahi peran Departemen Konservasi untuk

meningkatkan dukungan pada sumber daya alam dan historis yang ada di Selandia Baru (Departement of Conservation, n.d.).

Dari sejumlah kebijakan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintahan Lange lebih berfokus pada pemulihan ekonomi di Selandia Baru. Namun, hal itu bukan berarti pemerintah lalai pada isu lingkungan. Rezim pada masa itu membentuk dua undang-undang yang menjadi dasar terbentuknya institusi baru di Selandia Baru terkait lingkungan. Memang, pada masa pemerintahan Lange, isu lingkungan masih menjadi isu domestik yang sebatas mewadahi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada di Selandia Baru. Kemunculan isu lingkungan sebatas menjadi isu domestik disebabkan oleh belum naiknya isu lingkungan menjadi permasalahan seluruh dunia. Pada masa ini juga, dunia internasional belum membentuk rezim berkaitan dengan isu lingkungan internasional. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena fokus orientasi kebijakan luar negeri Selandia Baru pada masa pemerintahan Perdana Menteri Lange adalah mengenai nilai anti-nuklir internasional.

2.1.2 Geoffrey Palmer

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Palmer, privatisasi masih menjadi salah satu agenda utama guna pemulihan ekonomi Selandia Baru. Privatisasi bisnis ditandai dengan adanya penjualan saham perusahaan publik yang dilakukan pemerintah kepada *Bank of New Zealand*, *Petrocorp*, dan *Development Finance Corporation dan Air New Zealand* (Boston, 1987b:375). Kebijakan moneter Selandia Baru ini mengarah pada deflasi dengan bank-bank yang independent sesuai dengan *Reserve Bank Act 1989* (Goldfinch, 2004:81). Deregulasi pasar yang

dilakukan oleh Perdana Menteri Palmer merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang diprakarasi oleh Perdana Menteri Lange.

Dalam hubungan luar negeri Selandia Baru, sebenarnya tidak banyak literatur yang membahas mengenai pemerintahan Palmer mengingat Palmer menjabat dari Agustus 1989 sampai dengan September 1990. Namun, pada masa pemerintahan yang cukup singkat, Palmer menunjukkan posisi Selandia Baru pada kasus pengeboman kapal Rainbow Warrior di pelabuhan Auckland yang dilakukan oleh Perancis. Saat itu, Palmer masih menjabat sebagai wakil perdana menteri dan Menteri Keadilan Selandia Baru. Palmer berbicara di Majelis Umum PBB yang ke 24 September 1985 bahwa tenggelamnya kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace merupakan sebuah bentuk terorisme internasional (Thakur, 1986:210).

Selain sebagai Perdana Menteri, Palmer juga berprofesi sebagai pengajar hukum internasional. Dalam tulisannya, Palmer (1986:416) menyatakan beberapa gagasan terkait dengan kebijakan lingkungan di Selandia Baru. Tulisannya yang berjudul “*Sustainability – New Zealand’s Resource Management Legislation*” berisi mengenai proposal dibentuknya legislasi sumber daya, yaitu:

“...*Resource management must protect the needs of future generations by recognizing the concept of sustainable development. We need laws to help us enjoy and use what we have without endangering or compromising quality of life for ourselves or future generations...*” (Palmer, 1986:416).

Tulisan tersebut memuat gagasan Palmer mengenai perlunya reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya guna kelangsungan lingkungan dan kebijakan yang berkelanjutan di Selandia Baru (Palmer, 1986:416). Ide ini kemudian menjadi salah satu cikal bakal dibentuknya *Resource Management Act* dan *Crowns Mineral Act* tahun 1991.

Palmer mengkritik mengenai rezim lingkungan internasional yang masih cenderung lambat, tidak terstruktur, dan tidak pasti dalam tulisannya. Palmer berpendapat bahwa perlu adanya badan baru PBB yang membawahi mengenai isu lingkungan agar proses monitor, kepatuhan negara, dan implementasi rezim internasional terkait lingkungan dapat dilakukan secara efektif (Palmer, 1992:283). Tulisan tersebut ditulis pada tahun 1992, setelah Palmer tidak menjabat lagi menjadi Perdana Menteri.

Gagasan Palmer dan tulisannya banyak berkaitan dengan isu reformasi kebijakan, lingkungan, dan juga hukum internasional. Akan tetapi, pada masa pemerintahannya belum ada kebijakan signifikan ataupun tindakan nyata Selandia Baru yang menunjukkan kepedulian negara tersebut terkait isu lingkungan di rezim internasional. Lingkungan bukan menjadi fokus utama Selandia Baru, melainkan reformasi ekonomi merupakan agenda utama pemerintahan. Hal ini dibuktikan melalui serangkaian privatisasi bisnis yang dilakukan oleh Palmer dan deregulasi pasar. Masa pemerintahannya yang singkat membuat penulis sulit untuk mengidentifikasi orientasi kebijakan luar negeri Selandia Baru pada masa pemerintahan Perdana Menteri Palmer.

2.1.3 Mike Moore

Perdana Menteri Palmer kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Mike Moore pada tahun 1990 dengan partai yang masih sama yaitu Partai Buruh. Pemerintahan Moore hanya bertahan selama delapan minggu yaitu pada 4 September 1990 sampai dengan 27 Oktober 1990 sebelum pemilihan umum dimenangkan oleh Partai Nasional. Pemerintahan yang berjalan lebih dari satu

bulan ini, tidak mengeluarkan kebijakan apapun berkaitan dengan isu lingkungan ataupun perubahan iklim mengingat waktu pemerintahannya yang sangat singkat. Mike Moore hanya mengisi kekosongan sementara pemerintahan Palmer sebelum akhirnya digantikan oleh Partai Nasional pada pemilu tahun 1990.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan perubahan iklim pada masa pemerintahan Partai Buruh Kelima terbilang cukup progresif pada masa itu. Selandia Baru mulai menyadari bahwa isu lingkungan merupakan isu yang penting, walaupun kebijakan yang dihasilkan belum secara spesifik menjurus pada isu perubahan iklim dan masih dalam lingkup domestik. Hal ini disebabkan pada masa pemerintahan Partai Buruh keempat fokus dari Selandia Baru adalah pemulihan ekonomi melalui liberalisasi dan privatisasi pasar. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berorientasi ekonomi dibandingkan fokus pada isu lingkungan.

Selain itu, dalam lingkup hubungan internasional, Selandia Baru pada masa ini memiliki sikap yang mendorong perdamaian, anti-nuklir, pro-kemerdekaan, dan kerjasama internasional. Hal tersebut dibuktikan utamanya dalam pemerintahan Perdana Menteri Lange. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Palmer, kebijakan juga masih sangat berorientasi pada ekonomi. Kendati demikian, Palmer sebagai seorang dosen hukum memiliki ide-ide dan gagasan yang sangat progresif terkait dengan isu lingkungan dalam lingkup global. Setelah digantikan sementara oleh Perdana Menteri Moore, belum ada kebijakan Selandia Baru terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim yang dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa pada masa pemerintahan Partai Buruh keempat isu lingkungan mulai menjadi perhatian Selandia Baru walau hanya dalam lingkup domestik.

2.2 Selandia Baru, Upaya Pendekatan Kembali pada ANZUS, dan Kebijakan Lingkungan Partai Nasional Keempat (1990-1999)

Tahun 1990, Partai Nasional memenangkan 67 kursi dari total 97 kursi parlemen pada masa itu (New Zealand National Party, n.d.). Perdana Menteri yang terpilih adalah Jim Bolger dengan masa pemerintahan tahun 1990 sampai dengan 1997, lalu digantikan oleh Perdana Menteri Jenny Shipley pada tahun 1997-1999. Ada banyak agenda politik yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Bolger dan Shipley, utamanya keterlibatan mereka pada isu lingkungan saat negara-negara di dunia mulai sadar mengenai isu lingkungan pada UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) di tahun 1992. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas lebih mendalam mengenai kebijakan luar negeri Selandia Baru utamanya pada isu lingkungan di masa pemerintahan Perdana Menteri Jim Bolger dan Jenny Shipley.

2.1 Jim Bolger

Hampir mirip dengan pemerintahan Perdana Menteri Lange, pemerintahan Bolger membuat Selandia Baru lebih aktif dalam forum internasional. Sejak mendeklarasikan diri sebagai negara anti-nuklir pada tahun 1984, Selandia Baru memiliki pergeseran aliansi dan juga orientasi kebijakan luar negeri utamanya setelah perang dingin tahun 1990-an. Aliansinya yang awalnya hanya berkuat pada Amerika Serikat dan Australia, bergeser menjadi Asia-Pasifik dan

internasionalis yang disebabkan oleh posisi geografis, budaya, dan politik Selandia Baru (Buchanan, 2010:256).

Renggangnya hubungan Selandia Baru dengan ANZUS, membuat tidak adanya jaminan dan kerja sama militer yang dimiliki oleh Selandia Baru. Oleh karena itu, Selandia Baru berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat dan kelangsungan aliansi ANZUS. Saat akhir tahun 1990, Kementerian Perdagangan dan Hubungan Eksternal Selandia Baru, Don McKinnon menyatakan bahwa Selandia Baru akan berupaya menjalin kembali kerja sama dengan Amerika Serikat terkait isu politik, pertahanan dan keamanan (McCraw, 2000:579). Perdana Menteri Bolger pada Juni 1993 berbicara di Kamar Dagang Amerika di Wellington, meminta Amerika Serikat untuk menerima undang-undang anti-nuklir yang dimiliki oleh Selandia Baru serta memperbaiki sikap politiknya terhadap negara tersebut (McCraw, 2000:580). Selandia Baru tidak akan meninggalkan komitmen anti-nuklirnya, alih-alih Bolger menyarankan pendekatan dua jalur, yaitu jalur keamanan dimana AS dan Selandia Baru dapat setuju ataupun tidak setuju terhadap kapal nuklir dan jalur politik dimana diadakan pertemuan tingkat tinggi antara kedua pemimpin negara tersebut (McCormick, 1995:406).

Upaya untuk mendekatkan diri kembali pada ANZUS utamanya Amerika Serikat pada masa pemerintahan Perdana Menteri Bolger berbuah baik. Pada tahun 1993, Presiden Clinton dan Perdana Menteri Bolger bertemu dalam KTT APEC untuk membahas kelangsungan hubungan kedua negara tersebut (McCraw, 2000:580). Hal ini kemudian menghasilkan kesepakatan tahun 1994 dengan Amerika Serikat yang mengumumkan bahwa hubungan politik bersama Selandia

Baru yang sebelumnya sempat dibekukan pada tahun 1987 akan dimulai kembali (McCraw, 2000:580). Arah politik luar negeri Selandia Baru pada masa pemerintahan Perdana Menteri Bolger berusaha untuk mendekatkan diri kembali pada negara-negara barat guna memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat.

Pada Maret 1994, Perdana Menteri Bolger menggarisbawahi bahwa agenda politik kebijakan Selandia Baru adalah republikanisme (Kelsey, 1994:1). Hal ini, menurut beberapa peneliti disebabkan oleh kondisi politik dan pemerintahan Selandia baru yang terdiri dari percampuran koalisi partai atau MMP (*Mixed-Member Proportional*) dalam sistem elektoral. Pernyataan ini bertujuan untuk menggaet pemilih progresif, muda, dan berpikiran internasional dibanding pendukung Partai Nasional yang biasanya tradisional dan konservatif agar Partai Nasional bisa kembali memenangkan pemilihan umum Selandia Baru (Kelsey, 1994:1).

Terkait dengan isu lingkungan atau *Climate Change Policy* (CCP), masa pemerintahan Partai Nasional keempat memiliki beberapa perubahan dan aksi yang cukup berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Selandia Baru pada masa ini menjadi lebih neoliberal dimana diberlakukan Undang-Undang Manajemen Sumber Daya tahun 1991 untuk mempermudah pengelolaan sumber daya alam yang ramah pada aktivitas bisnis (Rimmer, 2016:112). Undang-undang tersebut mengatur mengenai pajak emisi gas rumah kaca, subsidi pengurangan emisi, dan peraturan lainnya terkait dengan efisiensi energi dan industri (Hamilton, 2003:146). Kendati

kebijakan ini berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan, hanya saja orientasinya masih pada efisiensi bisnis dan industri.

Pada tahun 1992, *Rio Earth Summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi diadakan di Rio de Janeiro, Brasil dengan 185 negara yang berpartisipasi termasuk Selandia Baru (Ministry for the Environment, 2021). Selandia Baru bergabung pada 21 Maret 1994 dengan salah satu komitmennya adalah mengurangi emisi sebanyak 20% sebelum tahun 2000 (Hamilton, 2003:153). Namun demikian, pada masa Perdana Menteri Bolger, Menteri Lingkungan Rob Storey khawatir akan ketidakmampuan Selandia Baru untuk memenuhi target ini sehingga tahun 1992 dikeluarkanlah Rencana Pengurangan CO₂ (*CO₂ Reduction Action Plan*).

Kendati demikian, pendanaan untuk bidang lingkungan pada masa ini menurun, seperti Departemen Konservasi yang mengalami pemotongan dana sebesar 30% sekitar 1987 dan 1995 (Gleeson, 1996:1911). Bolger lebih berorientasi pada bisnis dan hasil pertanian, sehingga tidak terlalu mementingkan isu-isu lingkungan yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi Selandia Baru yang masih rentan (Basher, 2003:129). Bolger menambahkan bahwa ia tidak menjanjikan kebijakan-kebijakan lingkungan ataupun mencontoh negara lain yang sudah progresif dalam isu lingkungan.

Saat pemilihan umum pada November tahun 1993, dimana Jim Bolger kembali menjabat sebagai perdana Menteri, isu lingkungan bukanlah menjadi fokus utama Selandia Baru. Alih-alih isu utama saat pemilihan tersebut adalah mengenai akuntabilitas pemerintahan dalam hubungan internasional berkaitan dengan perbaikan hubungan antara Selandia Baru dan Amerika Serikat. Tidak hanya

mengabaikan terkait kebijakan-kebijakan lingkungan, pemerintah pada masa ini justru membangun tenaga listrik baru dan tidak patuh pada proposal Perusahaan Pemasok Listrik dan ECNZ (*Electricity Corporation of New Zealand*). Padahal, berdasarkan data dari Greenpeace 73% dari orang-orang Selandia Baru tidak membutuhkan pembangkit listrik baru (Basher, 2003:155).

Isu lingkungan yang mulai menjadi sorotan dunia internasional pada tahun 1990-an belum berhasil membuat Selandia Baru berkomitmen penuh dalam bidang ini. Pemerintahan Jim Bolger yang cenderung republikan dan menekankan pada neoliberalisme memang sangat berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kerjasama internasional. Pada masa ini, Selandia Baru menunjukkan keterlibatan dan peran aktifnya dalam organisasi internasional seperti PBB dan upaya penjaga perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Hal itu disebabkan untuk merekatkan kembali hubungan Selandia Baru pada negara-negara barat khususnya Amerika Serikat setelah sebelumnya pada masa pemerintahan Partai Buruh keduanya terlibat krisis. Upaya rekonsiliasi Selandia Baru dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bolger menunjukkan titik terang saat Presiden Clinton mengumumkan akan kembali menjalin hubungan politik dengan Selandia Baru. Kendati demikian, Selandia Baru tetap tidak meninggalkan nilai anti-nuklir yang dipegangnya.

2.2 Jenny Shipley

Setelah Jim Bolger, jabatan Perdana Menteri Selandia Baru digantikan oleh Jenny Shipley pada tahun 1997 sebagai perdana menteri perempuan pertama di

Selandia Baru (Fountaine, 2002:167). Pada masa pemerintahan ini, Selandia Baru menghadapi beberapa tantangan salah satunya adalah Krisis Moneter Asia pada tahun 1998.

Perdana Menteri Shipley menuai banyak kritik karena sikapnya yang inkonsisten dalam menangani krisis tersebut. Anggaran kesejahteraan seperti program upah masyarakat dan tunjangan dikurangi sekitar 4 sampai dengan 17% (Loughrey-Webb, 2015:17). Pemberitaan di media pada saat itu juga menyoroti bagaimana kegagalan dan skandal dari pemerintahan Perdana Menteri Shipley seperti *Sunday Star Times* yang menulis mengenai buruknya pelayanan publik serta masalah terkait dengan reformasi listrik (Fountaine, 2002:166).

Pada tahun 1997, Selandia Baru menandatangani Protokol Kyoto sekaligus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2012 (New Zealand Foreign Affairs and Trade, 1998). Dalam isu lingkungan, Shipley menyatakan bahwa ia akan memimpin salah satu program Departemen Konservasi (DoC) bernama "*Ocean Strategy*" untuk memperkuat strategi ekonomi dalam mengelola sumber daya laut di Selandia Baru (Logan, 2013:94) Selain di bidang maritim, Perdana Menteri Shipley juga merencanakan mengenai "*Biodiversity Strategy*". Strategi ini direncanakan akan selesai sebelum tahun 2000, namun pemerintahan Shipley digantikan pada tahun 1999.

Dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shipley, kebijakan terkait dengan isu lingkungan masih bersifat domestik dan berorientasi pada profit. Ekonomi masih menjadi fokus utama Selandia Baru karena pada saat itu Selandia Baru terkena dampak serius dari Krisis Moneter Asia

Tenggara 1998. Masa pemerintahan Shipley yang cukup singkat menuai banyak kritik dari media karena ketidakmampuannya dalam memajemen pelayanan publik di tengah kondisi krisis ekonomi.

Masa pemerintahan Partai Nasional kelima lagi-lagi berorientasi ekonomi sama seperti Partai Buruh keempat. Hal tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi politik global yang tidak stabil bahkan kerap dilanda krisis moneter. Pada masa pemerintahan Bolger, isu lingkungan cenderung ditinggalkan. Bolger lebih berfokus pada rekonsiliasi hubungan antara Selandia Baru dan Amerika Serikat serta reformasi neoliberalisme. Memang, pada masa ini dunia internasional mulai menaruh perhatian pada isu lingkungan, namun posisi Selandia Baru hanya sebagai penanda tangan dari UNFCCC 1992 tanpa mengeluarkan hukum legal yang berusaha untuk mengurangi emisi gas di negara tersebut. Setelah digantikan oleh Shipley, kebijakan luar negeri Selandia Baru cenderung stagnan dan berorientasi ekonomi. Kendati sudah menandatangani Protokol Kyoto, tetap saja komitmen ini belum tertuang dalam payung hukum yang ada di Selandia Baru.

2.3 Selandia Baru pada Isu Perubahan Iklim dan Keberlanjutan

Pemerintahan Partai Buruh Ke Lima (1999-2008)

Pemerintahan Partai Buruh kelima di Selandia Baru dipegang oleh Helen Clark sebagai perdana Menteri wanita ke dua yang menjabat setelah Jenny Shipley. Setelah pemilihan umum tahun 1999, pemerintahan Partai buruh menunjukkan orientasi kebijakannya yang progresif dimana berusaha untuk menggabungkan ekonomi sayap kanan dan kebijakan sosial sayap kiri (Rimmer & Daniel,

2016:144) . Partai Buruh juga beraliansi dengan Partai Aliansi (*Alliance Party*) dan juga Partai Hijau (*Green Party*). Clark menjabat sejak tahun 1999 sampai dengan 2008.

Perdana Menteri Clark memiliki orientasi kebijakan luar negeri yang cenderung mendorong pada hak asasi manusia, demokrasi, dan nilai *self-determination* atau menentukan nasib sendiri. Hal ini dibuktikan dari serangkaian intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Selandia Baru. Pada 19 Mei tahun 2000, Fiji mengalami krisis dimana pemerintahan buruh Fiji yang dipimpin oleh Mehendra Chaudhry dikudeta oleh George Speight dan kelompok bersenjata (Fiji Islands Political Crisis: Background, Analysis, and Chronology, 2000:4).

Menanggapi kasus ini, Helen Clark menyuarakan dukungan untuk pemulihan pemerintahan Fiji yang dipimpin oleh Mahendra Choudry dan mengkritik keputusan Dewan Kepala Besar Fiji yang menggantikan pemerintahan Choudry dengan pemerintahan sementara (McCraw, 2005:220). Saat pemerintahan Fiji memulih pada Agustus 2001, hubungan Selandia Baru dengan negara tersebut juga turut memulih.

Sedangkan, dalam hubungannya dengan ANZUS, Selandia Baru cenderung memiliki hubungan yang longgar baik itu dengan Australia maupun Amerika Serikat. Perdana Menteri Clark bahkan menyatakan bahwa ia tidak menganggap Selandia Baru dan Australia sebagai entitas strategis tunggal atau *single strategic entity* (Patman, 2005:10). Artinya, Selandia Baru dan Australia merupakan dua negara yang bisa saja berbeda dalam memiliki orientasi militer utamanya dalam ANZUS. Terlebih lagi, kerjasama militer yang disepakati pada masa pemerintahan

Partai Nasional sebelumnya, Bolger dan Shipley, diabaikan oleh Clark. Contohnya, negosiasi untuk memperoleh 28 unit pesawat tempur F-16 milik Amerika Serikat ditinggalkan dengan alasan pesawat tempur tersebut terlalu banyak dan terlalu mahal untuk kebutuhan militer Selandia Baru (Patman, 2005:11).

Selandia Baru juga turut menaruh perhatiannya di wilayah Asia-Pasifik. Di tahun 2008, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters mengumumkan bahwa Selandia Baru akan memberikan hibah sebanyak 2 miliar dollar selama delapan tahun untuk asistensi pembangunan di wilayah Pasifik (Peters, 2008). Peters menyatakan bahwa wilayah Pasifik menjadi salah satu fokus dari Selandia Baru dalam memberikan asistensi pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan taraf hidup, kesehatan, dan keamanan di wilayah tersebut.

Komitmen Selandia Baru dalam isu perubahan iklim baik di ranah domestik maupun internasional menguat di masa pemerintahan Perdana Menteri Clark, berbeda dengan Amerika Serikat yang memutuskan untuk hengkang dari persetujuan Protokol Kyoto dan Australia yang hampir keluar karena AS (Patman, 2005:14). Helen Clark menyatakan bahwa *“no greater environmental issue facing us today than climate change”*, yang berarti isu perubahan iklim merupakan isu krusial yang harus menjadi perhatian semua orang (Rimmer & Daniel, 2016:126). Dalam Konferensi antara Selandia Baru dan Australia pada November 2004, Clark menegaskan bahwa Selandia Baru merupakan innovator dan pemimpin di bidang teknologi sehingga posisi ini bisa dimanfaatkan oleh Selandia Baru menjadi inovator di bidang lingkungan dan mitigasinya. Melalui pidato tersebut, Clark menekankan bahwa Selandia Baru memiliki komitmen untuk perubahan iklim

melalui rezim-rezim internasional seperti Protokol Kyoto, UNFCCC, dan Perjanjian Paris (Clark, 2004).

Kesadaran Selandia Baru pada isu perubahan iklim di masa pemerintahan Perdana Menteri Clark menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibanding pemerintahan sebelumnya. Masa pemerintahan Clark menjadi penanda dibentuknya Kementerian Perubahan Iklim tahun 2002. Kementerian ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Lingkungan tahun 1986 (Ministry for the Environment New Zealand, 2021b). Kementerian ini bertugas untuk mengurus urusan domestik dan internasional Selandia Baru terkait upaya pencegahan perubahan iklim.

Pada 13 Februari 2007, Perdana Menteri Clark mengumumkan mengenai program *NZ Carbon Neutral Public Service (CNPS)*. Program ini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menggerakkan 34 departemen pelayanan publik menjadi netral karbon pada tahun 2012 (Birchall et al., 2013:64). Kendati sektor pelayanan publik hanya menyumbang 2% dari total emisi Selandia Baru, namun kebijakan ini tetap dikeluarkan sebagai bentuk komitmen dan peran Selandia Baru dalam isu perubahan iklim di tingkat internasional (Birchall et al., 2013:64).

Komitmen Selandia Baru terhadap Protokol Kyoto, UNFCCC, dan Perjanjian Paris juga dituang dalam munculnya *Climate Change Response Act* (Undang-Undang Tanggapan Perubahan Iklim) tahun 2002 yang melibatkan Kementerian Keuangan untuk mengelola alokasi dan target emisi gas rumah kaca Selandia Baru (Ministry for the Environment New Zealand, 2021a). Adanya

Protokol Kyoto mempermudah Selandia Baru dalam memitigasi dan mengatur perdagangan emisi gas rumah kacanya. Undang-undang ini kemudian mengeluarkan Undang-Undang Amandemen Tanggapan Perubahan Iklim (Perdagangan Emisi) 2008 yang memberlakukan Skema Perdagangan Emisi Selandia Baru (*New Zealand Emissions Trading Scheme*). *New Zealand Emissions Trading Scheme* berusaha untuk mencakup semua sektor seperti harga emisi dari listrik dan gas, transportasi, industri, limbah, dan aktivitas kehutanan (Owen, 2016:16). Kebijakan ini sudah diajukan sebelumnya pada September 2007 lalu mulai diberlakukan dua belas bulan setelahnya (Kelly, 2010:9).

Setelah menjabat menjadi Perdana Menteri Selandia, Clark menjabat menjadi Administrator UNDP periode 2009 sampai dengan 2017. Banyak aksinya yang memang mendukung isu lingkungan dan juga pembangunan keberlanjutan. Selandia Baru di bawah pemerintahan Perdana Menteri Clark dapat dilihat masih mempertahankan sikapnya yang anti nuklir. Jika dilihat, sudah jelas bahwa posisi Selandia Baru pada masa pemerintahan Helen Clark berorientasi Liberal Institusionalis yang cenderung pasifis dimana negara tersebut terlibat aktif di PBB dan secara tegas mempertahankan pemahaman anti-militernya.

Dalam isu perubahan iklim, Selandia Baru dalam periode pemerintahan Clark dapat disimpulkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasinya. Hal tersebut terbukti dari serangkaian undang-undang yang dibuat Selandia Baru terkait dengan perdagangan emisi gas rumah kaca, lalu juga mengeluarkan program *Carbon Neutral Public Service (CNPS)*.

Pada masa pemerintahan Clark, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri Perubahan iklim memiliki peran yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan Clark berkoalisi dengan Partai Hijau Selandia Baru. Kementerian Perubahan Iklim juga dibentuk pada masa pemerintahan Clark yang menunjukkan besarnya komitmen Selandia Baru pada isu perubahan iklim pada ranah domestik maupun internasional. Kendati Amerika Serikat dan Australia terlihat enggan untuk terlibat dalam Protokol Kyoto, Selandia Baru tetap mantap dengan posisinya untuk mendukung rezim internasional terkait perubahan iklim. Dapat disimpulkan bahwa Selandia Baru sangat aktif pada periode ini dalam menekankan isu perubahan iklim sebagai salah satu agenda utama Selandia Baru dibandingkan dengan isu ekonomi.

2.4 Selandia Baru dan Upaya Kerjasama dengan ANZUS Partai Nasional Kelima (2008-2017)

Pada pemilihan November tahun 2008, John Key dari Partai Nasional memenangkan pemilihan sehingga pemerintahan Helen Clark digantikan. Bergantinya pemerintahan Partai Buruh membuat kebijakan yang ada juga berganti sesuai dengan orientasi politik Partai Nasioanal. Adapun masa pemerintahan Partai Nasional kelima berlangsung selama dua periode. Periode pertama dipimpin oleh John Key atau Sir John Philip Key dengan masa pemerintahan yang berlangsung sejak tahun 2008 sampai dengan 2016. Kemudian John Key mengundurkan diri sebagai perdana menteri setelah memenangkan pemilu sebanyak dua kali. Lalu, posisi tersebut digantikan oleh Bill English atau Sir Simon William English dengan masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Berikut

penjabaran kebijakan luar negeri Selandia Baru, khususnya dalam isu lingkungan dan perubahan iklim pada masa pemerintahan John Key dan Bill English.

2.4.1 John Key

Pada masa pemerintahan ini, legislasi Skema Perdagangan Emisi atau *NZ Emissions Trading Scheme* yang sudah dibuat pada masa pemerintahan Perdana Menteri Clark dibatalkan dan digantikan dengan kebijakan baru yang lebih longgar (Birchall et al., 2013:64). Selain itu, *CPNS Initiative* atau *Carbon Neutral Public Service* yang juga telah digagas oleh Perdana Menteri Clark diakhiri pada Maret 2009 oleh menteri lingkungan dan perubahan iklim, Nick Smith (Birchall et al., 2013). Perombakan kebijakan yang cukup signifikan ini membuat masa pemerintahan Partai Nasional kelima dan Partai Buruh memiliki orientasi politik yang berbeda.

Pada masa pemerintahan John Key, hubungan Selandia Baru dengan Amerika Serikat menguat. Hal ini dibuktikan melalui ditandatanganinya *Wellington Declaration* pada 4 November 2010 yang berisi tentang kesepakatan untuk membangun proyek praktis di wilayah Pasifik dan memperkuat dialog *high-politics* antara keduanya (Ayson & Phillips, 2012). Deklarasi ini juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama lebih lanjut di bidang keamanan, maritim, melawan terorisme, bimbingan kemanusiaan, dan bantuan bencana untuk mendorong perdamaian di wilayah Pasifik (Watkins, 2012)

Terlebih lagi, John Key bahkan menyatakan bahwa perbedaan kebijakan nuklir antara kedua negara bukan menjadi halangan karena Selandia Baru menunjukkan keterlibatannya dalam *the Rim of the Pacific Exercise* (RIMPAC),

sebuah latihan militer maritim terbesar di dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat (Vaughn, 2021). Pada hari jadi ke-75 angkatan laut Selandia Baru, kapal militer AS diperbolehkan untuk melewati perairan Selandia Baru setelah sebelumnya kebijakan anti-nuklir Selandia Baru menolak kapal AS sejak pemerintahan Perdana Menteri David Lange (Young, 2016).

Pada pertemuan G20 di Brisbane, Perdana Menteri Key menyatakan bahwa industri susu tidak dapat mencegah terjadinya perubahan iklim sebagai akibat dari gas metana dan dinitrogen oksida yang dihasilkan oleh hewan ternak (NZHerald, 2014). Oleh karena itu pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. John Key juga menyatakan dalam Konferensi Perubahan Iklim di Paris bahwa pemerintah Selandia Baru akan meningkatkan pendanaan sebesar \$20 juta selama 4 tahun guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, Perdana Menteri Key mengumumkan bahwa Selandia Baru mengalokasikan \$200 juta untuk memberikan dukungan iklim utamanya bagi negara-negara Pasifik (NZHerald, 2014).

Akan tetapi, kepedulian John Key pada perubahan iklim cenderung tidak konsisten. Saat diwawancara oleh salah satu media Selandia Baru, John Key menyatakan tidak semua hal berkaitan dengan perubahan iklim harus dilegislati seperti permintaan James Shaw, wakil Partai Hijau pada masa itu. Ia lebih setuju jika undang-undang terkait hak asasi manusia dibentuk dibandingkan dengan pembentukan undang-undang terkait perubahan iklim (Moir, 2015). Bahkan saat diwawancara oleh salah satu media Selandia Baru, ia menyatakan bahwa memang benar perubahan iklim adalah sebuah masalah akan tetapi perubahan iklim bukanlah ancaman terbesar umat manusia (Newstalk ZB, 2015)

Pada tahun 2015, pada masa pemerintahan Perdana Menteri Key, *kasus climate change refugee* atau pengungsi perubahan iklim pertama kali terjadi. Pada masa itu, seorang asal Kiribati bernama Ioane Teitiota bersama dengan keluarganya mencoba untuk memperpanjang visanya yang sudah habis di tahun 2011 pada Pemerintah Selandia Baru dengan klaim sebagai pengungsi perubahan iklim (BBC, 2015). Teitiota mengklaim bahwa di negara asalnya Kiribati, air laut mulai naik dan menimbulkan krisis.

Perdana Menteri John Key menyatakan bahwa ia tidak percaya dengan klaim tersebut dan tetap akan melakukan deportasi. Pendapat ini, menimbulkan banyak permohonan publik utamanya dari komunitas warga Tuvalu dan Kiribati di Selandia Baru untuk menghentikan deportasi tersebut (Bartlett, 2015). Akan tetapi, Pemerintah Selandia Baru menolak klaim tersebut dengan tetap mendeportasi Teitiota dan keluarganya karena klaim yang diberikan tidak kuat. Kasus ini menjadi kasus pengungsi perubahan iklim pertama yang pernah terjadi dan kemudian menjadi perhatian dunia internasional baru-baru ini.

Dapat disimpulkan bahwa masa pemerintahan John Key memiliki orientasi yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Selandia Baru yang awalnya berusaha untuk mempertahankan prinsip anti-nuklirnya kemudian mulai terbuka dan menjalin relasi yang baik dengan Amerika Serikat umumnya di bidang pertahanan. Hubungan baik Selandia Baru dan Amerika Serikat semakin terjalin pada masa pemerintahan John Key, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Beberapa kebijakan yang sebelumnya digagas oleh Helen Clark juga dibatalkan seperti NZ

Emissions Trading Scheme dan *Carbon Neutral Public Service*. Padahal, sebelumnya dua kebijakan tersebut sudah melewati tahap legislasi.

Selain itu, posisi Perdana Menteri John Key terkait dengan isu lingkungan juga cenderung abu-abu. Pada masa pemerintahan John Key, Selandia Baru berhasil membangun citranya yang peduli dalam isu lingkungan utamanya di koferensi internasional seperti Perjanjian Paris. Bahkan, Selandia Baru berkomitmen untuk mencegah peningkatan gas rumah kaca dan membantu negara-negara Pasifik melalui pendanaannya. Akan tetapi, dalam isu lingkungan dan perubahan iklim di ranah domestik. John Key cenderung apatis dengan menolak dibuatnya undang-undang baru terkait perubahan iklim lalu menolak adanya pengungsi perubahan iklim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa John Key cenderung moderat dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Isu lingkungan memang merupakan masalah yang penting namun agenda utama pemerintahan ini bukanlah mengenai isu lingkungan.

2.4.2 Bill English

Pada tahun 2016, John Key mengundurkan diri dari pemerintahan dan kemudian digantikan oleh Bill English, Menteri Keuangan Selandia Baru pada awal masa pemerintahan Perdana Menteri Key. Sesaat setelah dilantik menjadi perdana menteri di Government House, Wellington, English menyatakan bahwa perannya dalam memimpin adalah untuk “menggali berlian” yang ada di sekitar Selandia Baru. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang berusaha untuk memahami dan berfokus pada pemecahan permasalahan masyarakat sipil daripada pendekatan atas-bawah (Wyeth, 2016). Dalam

pernyataannya kepada media, Perdana Menteri English juga menyatakan bahwa ia memiliki serangkaian program prioritas yang berbeda dengan pemerintahan John Key. English menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas serta memberikan layanan sosial bagi kelompok-kelompok rentan di Selandia Baru (Trevett, 2016).

Dalam kebijakan luar negerinya, Perdana Menteri English menandatangani sebuah memorandum bersama Perdana Menteri Li Keqiang tentang program *Belt Road Initiative* (BRI) Cina pada Maret 2017 (Ayson, 2020:10). Penandatanganan ini muncul sebagai akibat dari aktifnya peran Cina di wilayah Asia-Pasifik sehingga Selandia Baru menjadikannya sebagai salah satu partner strategis.

Setelah itu, pada tahun 2017, diadakan pemilihan umum ulang yang dimenangkan oleh Jacinda Ardern sehingga Bill English tidak menjabat lagi menjadi perdana Menteri. Kebijakan yang dihasilkan oleh English selama masa pemerintahannya juga tidak banyak mengingat masa pemerintahannya yang sebentar. Terkait dengan isu lingkungan, English memiliki pandangan yang moderat namun juga skeptis. Pasalnya dalam beberapa wawancara media, ia menyatakan bahwa penandatanganan Perjanjian Paris saja sudah cukup bagi Selandia Baru. Ia melanjutkan bahwa Selandia Baru tidak akan seekstrim Amerika Serikat yang memutuskan untuk keluar dari Perjanjian Paris (Otago Daily Times, 2017). Selandia Baru juga tidak akan mengikuti langkah Britania Raya yang membuat undang-undang terkait dengan pengaturan gas rumah kaca (O'Brien, 2017a). Melalui pandangan tersebut, tidak ada kebijakan signifikan berkaitan dengan

isu lingkungan ataupun pencegahan perubahan iklim di masa pemerintahan Bill English.

Dapat disimpulkan bahwa baik pemerintahan John Key maupun Bill English tidak ada kebijakan lingkungan yang signifikan. Keduanya sama-sama memiliki pandangan yang moderat terhadap isu lingkungan, namun juga cenderung skeptis sehingga tidak ada kebijakan lingkungan yang dihasilkan. Akan tetapi, pemerintahan John Key menaruh perhatian pada bantuan bagi negara-negara Pasifik, hal itu yang membedakannya dengan pemerintahan Bill English. Orientasi kebijakan Selandia Baru pada masa pemerintahan Partai Nasional berbeda dengan Partai Buruh. Partai Nasional pada masa pemerintahan John Key justru memberikan kebijakan yang terbuka pada Amerika Serikat dan Australia sebagai bagian dari ANZUS. Berbeda dengan pemerintahan Helen Clark yang memegang teguh nilai anti-nuklir negara tersebut.

2.5 Selandia Baru pada Isu Perubahan Iklim Masa Pemerintahan

Jacinda Ardern (2017 – 2022)

Pada pemilihan umum Selandia Baru tahun 2017, sistem elektoral dimenangkan oleh Jacinda Ardern yang berasal dari Partai Buruh. Hasil ini cukup mengejutkan karena sebelumnya Partai Nasional diprediksi akan memenangkan pemilihan 2017 sekali lagi (Vowles, 2018). Akhirnya, Jacinda Ardern dilantik menjadi perdana menteri Selandia Baru pada 26 Oktober 2017 dan menjadi Perdana Menteri termuda pertama di dunia yaitu menjabat di usianya yang ke 37 tahun

(Griffiths, 2017). Ardern juga menjadi perdana menteri Selandia Baru wanita ketiga setelah Jenny Shipley dan Helen Clark yang sebelumnya pernah memerintah.

Jacinda Ardern dalam wawancara bersama TVNZ menyatakan rencananya untuk mengubah hubungan antara Selandia Baru dengan negara-negara Pasifik. Hubungan yang dimaksud adalah bukan lagi hubungan antara donor dan resipien tetapi hubungan kerjasama atau '*partnership*' (TVNZ, 2018). Perdana Menteri Ardern juga menyuarakan bahwa warga Selandia Baru merupakan bagian dari Pasifik, sehingga penting bagi Selandia Baru untuk memiliki hubungan kerjasama berkelanjutan yang erat dengan negara-negara Pasifik (Prendergast, 2018).

Melalui pernyataan tersebut, pada 28 Maret 2018, Winston Peters mengumumkan bahwa Selandia Baru akan mengatur ulang hubungannya dengan negara-negara pasifik melalui *Pacific Reset* dengan beberapa agenda perubahan yaitu fokus pada keamanan dan kesejahteraan ekonomi Pasifik, isu lingkungan dan masyarakat, serta peningkatan fokus pada negara-negara pasifik sebagai aset utama (Tradestaff Global, 2020). *Pacific Reset* merupakan bagian dari strategi regional Selandia Baru yang berusaha untuk membangun kerjasama, pemahaman, upaya bersama untuk mencapai tujuan berkelanjutan di Pasifik (Huitt, 2019).

Pacific Reset secara resmi menjadi program Selandia Baru pada 4 Desember 2018 oleh Kementerian Luar Negeri Selandia Baru di bawah tanggung jawab Kabinet Hubungan Eksternal dan Komite Keamanan (Cabinet External Relations and Security Committee, 2018). Program ini merupakan wujud keterlibatan Selandia Baru dalam upaya keamanan dan kerjasama regional.

Salah satu bentuk dari *Pacific Reset* yang digagas Selandia Baru adalah serangkaian kunjungan Jacinda Ardern dan Winston Peters ke negara-negara di Pasifik. Di Kepulauan Solomon, Winston Peters menandatangani pernyataan kemitraan dengan Jeremiah Manele, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Kepulauan Solomon. Kemitraan ini berisi dukungan Selandia Baru pada pembentukan *Solomon Islands Airport Corporation Limited* sebagai badan usaha milik negara yang bertanggungjawab dalam pembangunan bandara di Kepulauan Solomon (Huitt, 2019).

Selain itu, masa pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern memiliki kebijakan yang peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim utamanya di wilayah Pasifik. Pada tahun 2018, Selandia Baru mengeluarkan *Strategic Defense Policy Statement* yang menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi keamanan regional. Selain itu, perubahan iklim juga dapat berdampak pada pembangunan regional dan juga menyebabkan munculnya masalah sosial baru (Wyeth, 2019).

Berkaitan dengan peristiwa pengungsi perubahan iklim, setelah pemilihan yang diadakan pada tahun 2017, Menteri perubahan iklim terpilih Selandia Baru, James Shaw, mengumumkan sebuah rencana bahwa Selandia Baru akan membuat “*an experimental visa*” untuk penduduk Pasifik yang terkena dampak dari perubahan iklim (Dempster & Ober, 2020). Rencana ini kemudian dikemukakan lagi oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Arden, mengenai adanya rencana “*climate refugee visa*” dengan menampung sebanyak 100 orang per tahunnya (Walters, 2019b). Wacana ini dikemas media sebagai sebuah kebijakan pionir yang

digadangkan akan memberikan sebuah tren baru bagi para pembuat kebijakan utamanya berkaitan dengan migrasi dan perubahan iklim.

Namun, enam bulan setelah kebijakan ini dipublikasikan, rencana kebijakan tersebut dibatalkan enam bulan setelahnya. Juru bicara *Green Party*, Golriz Ghahraman, menyatakan bahwa visa ini tidak dapat berlaku untuk konteks penduduk Pasifik disebabkan tiap negara mencoba memaksimalkan pada proses mitigasi isu kenaikan air laut daripada bergantung pada migrasi penduduk (Hall, 2017)

Oleh karena itu, upaya mitigasi ini dimanifestasikan dalam berbagai program seperti *Pacific Reset*, menambah pendanaan sebesar 300 juta Dollar dalam *New Zealand's Pacific and Development Plan 2019-2022* (New Zealand Foreign Affairs and Trade, 2019). Peningkatan pendanaan perubahan iklim di Pasifik Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru pada tahun 2019 dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1**Daftar Pendanaan Perubahan Iklim Selandia Baru di Pasifik Selatan
tahun 2018**

Negara	Agenda	Jumlah (Dollar Selandia Baru)
Nauru	Penanaman energi surya	4 Juta
Kepulauan Marshall	Pemetaan listrik untuk dekarbonisasi	1 juta
Samoa	Pendanaan <i>Pacific Climate Change Centre</i>	3,5 juta
Niue	Meningkatkan pembangunan energi terbarukan	Tidak disebutkan, peningkatan mencapai 40%
Seluruh Pasifik Selatan	Penyuaraan isu perubahan iklim	4 juta
	Pemetaan mitigasi perubahan iklim	5 juta

Sumber: (New Zealand Government, 2019), diolah oleh penulis

Pada pemilu tahun 2020 yang dimenangkan kembali oleh Jacinda Ardern, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru masih tetap bekerja sama dengan negara-negara Pasifik untuk memitigasi isu perubahan iklim. Sebagaimana disebutkan dalam *Ministry of Foreign Affairs and Trade Strategic Intention 2020-2024* yang menggarisbawahi mengenai komitmennya dalam perdagangan karbon internasional pada tahun 2022 dan juga meningkatkan pendanaan iklim multilateral untuk Pasifik melalui *Green Climate Fund* (New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade, 2020:25).

Dapat disimpulkan bahwa pada periode pemerintahan Jacinda Ardern, Selandia Baru sangat peduli dengan isu lingkungan dan perubahan iklim utamanya di wilayah Pasifik Selatan. Mengingat naiknya permukaan air laut yang terus menerus terjadi ditambah komitmen Selandia Baru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada Perjanjian Paris membuat negara ini menjadikan isu perubahan iklim menjadi salah satu agenda utama. Kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya dalam ranah internasional tetapi juga domestik. Di samping itu, Selandia Baru juga masih mempertahankan kerjasama internasional yang dijalinnya tidak hanya dengan negara-negara Pasifik tapi juga dengan negara persemakmuran dan negara Asia lainnya untuk mendorong kooperasi di bidang ekonomi dan keamanan.

2.6 Kesimpulan

Dinamika kebijakan luar negeri Selandia Baru mengalami perubahan fokus sesuai dengan siapa Perdana Menteri yang memerintah. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Selandia Baru berkaitan dengan isu lingkungan dan perubahan iklim mengalami perubahan dan juga perkembangan yang signifikan. Pada awal tahun 1980 sampai dengan 1990, orientasi Selandia Baru masih melekat pada pemulihan ekonomi secara domestik. Belum ada kesadaran mengenai isu lingkungan dan juga perubahan iklim. Selandia Baru pada masa ini sangat memegang prinsip anti-nuklir. Kemudian, di awal 1990 sampai dengan 1999, kesadaran dunia internasional mengenai isu lingkungan mulai muncul dengan adanya UNFCCC 1992 dan Protokol Kyoto. Akan tetapi, posisi Selandia Baru pada masa ini hanya sebatas menandatangani perjanjian internasional tersebut.

Saat pemerintahan diambil alih oleh Helen Clark pada akhir tahun 1990an dan awal 2000-an, Selandia Baru perlahan mulai menunjukkan kepeduliannya pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Hal ini terbukti melalui adanya program *Carbon Neutral Public Service* (CNPS) dan *Climate Change Response Act* (Undang-Undang Tanggapan Perubahan Iklim) tahun 2002. Kebijakan ini kemudian dibekukan saat Partai Nasional yang dipimpin oleh John Key memegang jabatan. Pada masa ini, posisi Selandia Baru cenderung abu-abu pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Selandia Baru dalam ranah internasional aktif mendorong perjanjian internasional terkait perubahan iklim seperti Perjanjian Paris namun tidak di ranah domestik. Begitu pula saat digantikan oleh Bill English, tidak ada kebijakan apapun yang dikeluarkan berkaitan dengan isu lingkungan dan perubahan iklim. Namun pada masa pemerintahan Jacinda Ardern, Selandia Baru menunjukkan peran aktifnya dalam isu lingkungan dan perubahan iklim utamanya bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Kebijakan ini diwujudkan dalam berbagai program yang berusaha untuk memitigasi isu lingkungan agar kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak berkepanjangan.